

BAB VI

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Dalam upaya mencapai tujuan, dan sasaran pembangunan, selain memperhatikan strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan, juga sangat dibutuhkan landasan perencanaan yang *SMART* (*Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, Timely*) yang ditempuh melalui pendekatan secara Tematik sesuai agenda pembangunan, *Holistik* (menyeluruh), *Integrated* (lintas sektor), dan *Spatial* (titik koordinat) lokasi kegiatan yang dilaksanakan. Dengan demikian program pembangunan yang dirancang harus memperhatikan :

- 1. Keterkaitan antara penganggaran dan sasaran yang dituju;
- 2. Memperhatikan kemanfaatan kegiatan, efektifitas dan efisiensi dalam anggaran; dan
- 3. Meningkatkan akuntabilitas dan pengelolaan anggaran yang tertib.

PRIORITAS 1 : Pangan, Sandang dan Papan



Gambar 6.1

Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 1

Berdasarkan gambar 6.1 yang menempatkan bidang Pangan, Sandang dan Papan sebagai prioritas 1 daerah Provinsi Bali. Untuk mewujudkan prioritas tersebut maka arah kebijakan pembangunan daerah difokuskan pada pelaksanaan program prioritas, yaitu:

1. Peningkatan ketersediaan pangan melalui kegiatan prioritas dalam upaya (1) mengatasi kerentanan pangan, (2) identifikasi dan pemanfaatan potensi sumber daya pangan, (3) peningkatan ketersediaan pangan.
2. Peningkatan produksi sandang lokal Bali melalui kegiatan prioritas dalam upaya (1) pendampingan industri tenun (2) monitoring dan evaluasi industri tenun.
3. Peningkatan rumah layak huni bagi masyarakat miskin sangat penting dilakukan mengingat perumahan merupakan pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh Pemerintah sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pembangunan manusia. Program prioritas ini akan dilaksanakan dalam upaya, (1) penyediaan bantuan rumah layak huni, (2) pembuatan sumur bor untuk wilayah yang belum mendapat pelayanan PDAM, (3) pembangunan instalasi pengolahan sampah, (4) pembangunan dan normalisasi sanitasi permukiman.
4. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan melalui kegiatan prioritas dalam upaya (1) pengembangan pangan pokok lokal non beras, (2) pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan kosong, (3) promosi penganekaragaman pangan.
5. Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian melalui kegiatan prioritas dalam rangka, (1) mengolah hasil pertanian pasca panen, (2) memastikan nilai jual harga hasil pertanian menguntungkan bagi petani.
6. Pengembangan koperasi pengerajin tenun merupakan industri kerajinan rakyat yang sudah dilaksanakan secara turun temurun oleh masyarakat desa, tradisi menenun masih ada dan terus dikembangkan dalam menjaga tradisi leluhur. Kegiatan ini dilaksanakan melalui, (1) pendampingan industri tenun, (2) mendorong pemberdayaan koperasi tenun, (3) fasilitasi pemasaran, promosi dan optimalisasi penyerapan produk kerajinan tenun, (4) pemberian bantuan kredit dengan bunga ringan.

7. Penguatan distribusi produk lokal melalui kegiatan prioritas dalam rangka, (1) peningkatan pemasaran produk lokal, (2) pelaksanaan pasar murah melalui operasi pasar.

PRIORITAS 2 : Kesehatan dan Pendidikan



Gambar 6.2

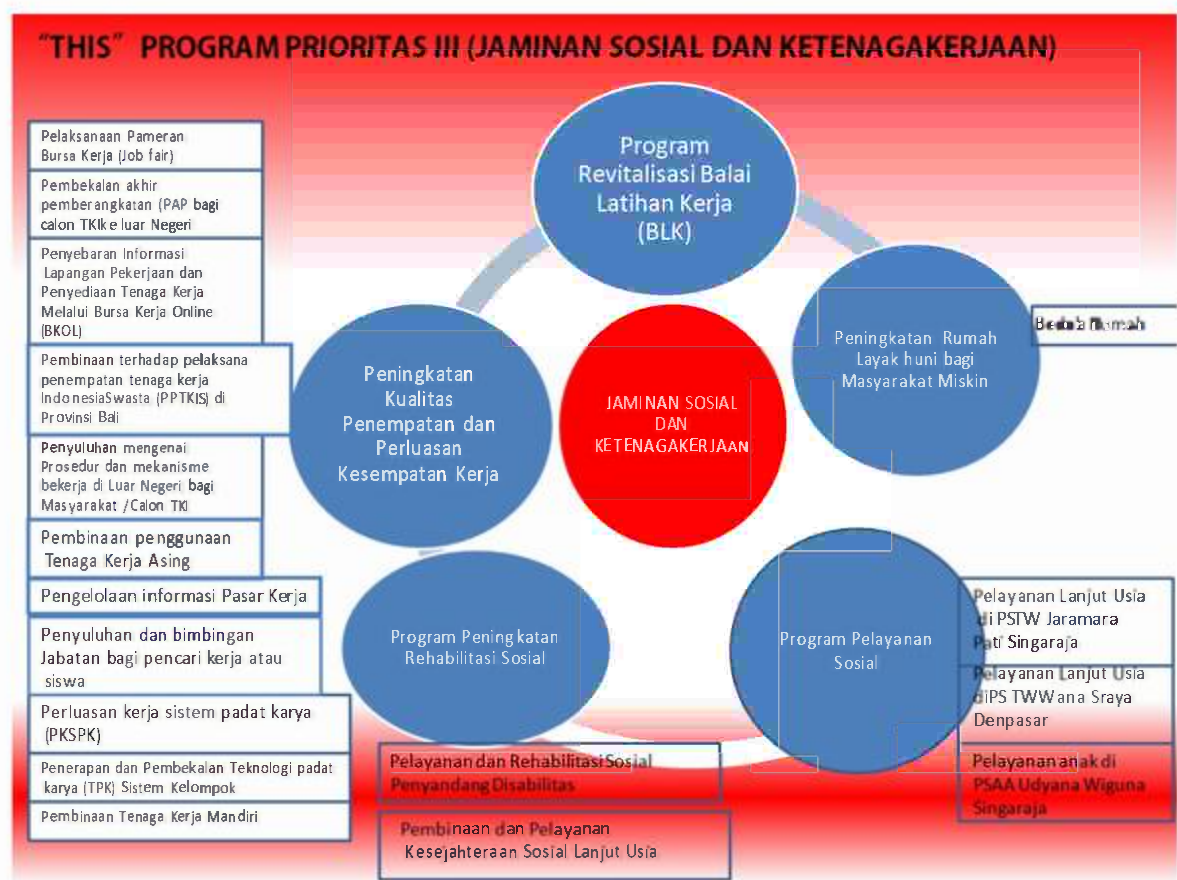
Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 2

Berdasarkan Gambar 6.2 yang menggambarkan prioritas pendidikan dan kesehatan dengan menggunakan pendekatan secara *Tematik*, *Holistik* (menyeluruh), *Integrated* dan *Spasial* ditentukan 4 (empat) Program Prioritas yaitu:

1. Penguatan fasilitas pelayanan dasar, melalui kegiatan prioritas dalam rangka, (1) Peningkatan pelayanan kesehatan di FKTP, (2) Peningkatan pelayanan kesehatan di FKTL, (3) penanggulangan bencana kluster kesehatan, (4) peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, (5) peningkatan obstetri neonatal emergency komprehensif/Ponek.

2. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, melalui kegiatan prioritas dalam upaya, (1) peningkatan kesehatan gizi masyarakat, (2) peningkatan kesehatan keluarga, (3) pengembangan promosi kesehatan dan penggerakan masyarakat hidup sehat, (4) upaya kesehatan kerja, (5) upaya kesehatan olah raga, (6) peningkatan kesehatan masyarakat melalui dana BOK, (7) penanganan stunting.
3. Jaminan kesehatan karma Bali sejahtera, dilakukan melalui kegiatan (1) penguatan jaminan kesehatan karma Bali.
4. Peningkatan kualitas pendidikan SMA/SMK, kegiatan prioritas ini dilaksanakan melalui, (1) bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/Kota, membangun atau mengembangkan laboratorium sarana dan prasarana ekstrakurikuler sekolah pendidikan menengah terpadu berdasarkan SPM, (2) menetapkan regulasi tentang SPM pendidikan menengah, (3) penetapan pemenuhan sarana prasarana pendidikan sesuai dengan SPM.

PRIORITAS 3 : Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan



Gambar 6.3

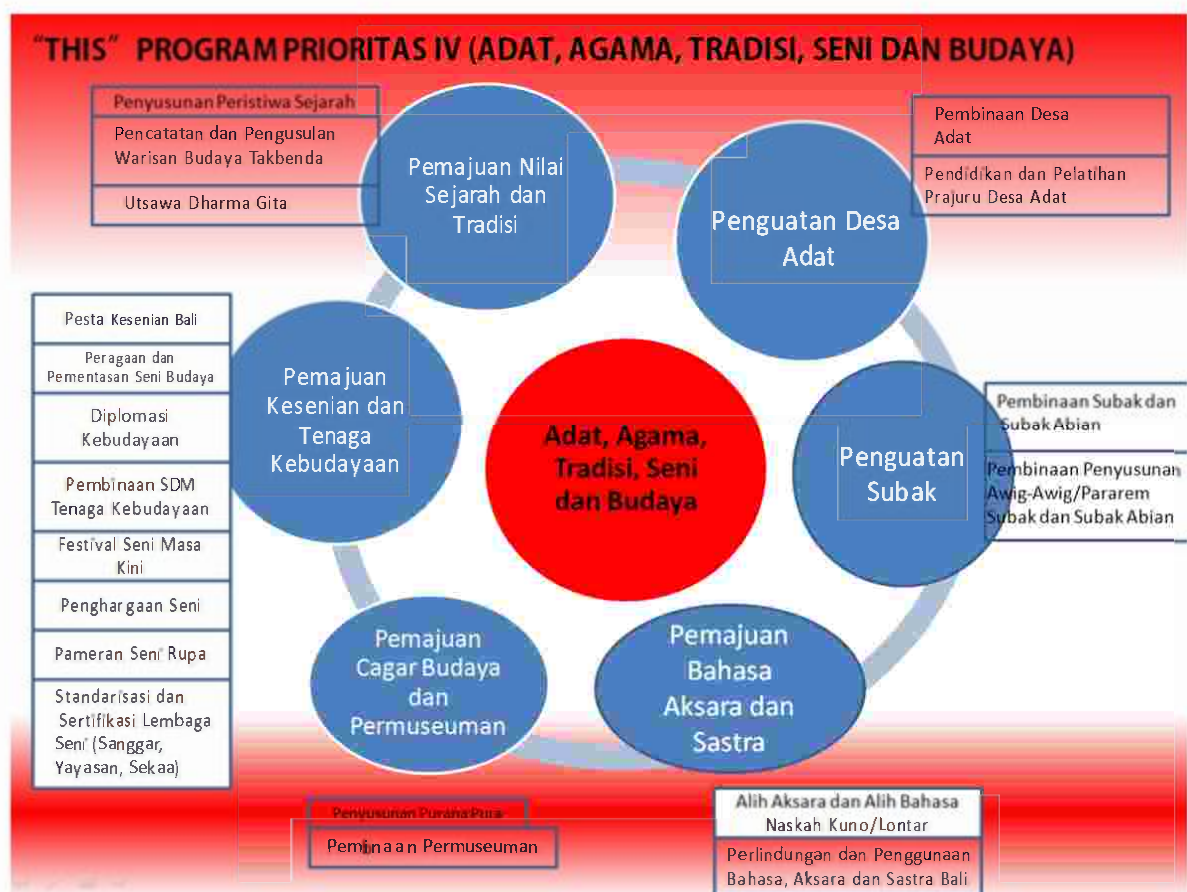
Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 3

Berdasarkan Gambar 6.3 yang menguraikan tentang prioritas 3 yaitu Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan ditentukan oleh 5 (lima) dimensi/Program Prioritas yaitu :

1. Program revitalisalsi Balai Latihan Kerja (BLK). Revitalisasi atau pemberdayaan dilakukan sesuai dengan potensi kearifan lokal masyarakat. Pelatihan pariwisata, pertukangan, perbengkelan, industri kerajinan dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata.
2. Peningkatan rumah layak huni bagi masyarakat miskin merupakan pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh Pemerintah. Program prioritas ini akan dilaksanakan dalam bentuk bedah rumah bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki rumah layak huni serta akses lainnya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin.

3. Program pelayanan sosial, merupakan kegiatan prioritas, melalui (1) pelayanan lanjut usia di PSTW Jaramara Pati Singaraja, (2) pelayanan lanjut usia di PSTW Wana Sraya Denpasar, (3) pelayanan lanjut usia di PSAA Udayana Wiguna Singaraja.
4. Program peningkatan rehabilitasi sosial, merupakan kegiatan prioritas dilaksanakan melalui, (1) pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, (2) pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia.
5. Peningkatan kualitas penempatan dan perluasan kesempatan kerja, merupakan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan melalui, (1) pelaksanaan pameran bursa kerja (job fair), (2) pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) bagi calon TKI ke luar negeri, (3) penyebaran informasi lapangan pekerjaan dan penyediaan tenaga kerja melalui bursa kerja online (BKOL), (4) pembinaan terhadap pelaksanaan penempatan tenaga kerja penyebaran informasi lapangan pekerjaan dan penyediaan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS), (5) penyuluhan mengenai prosedur dan mekanisme bekerja ke luar negeri bagi masyarakat/calon TKI, (6) pembinaan penggunaan tenaga kerja asing, (7) pengelolaan informasi pasar kerja, (8) penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja atau siswa, (9) perluasan kerja sistem padat karya (PKSPK), (10) penerapan dan pembekalan teknologi padat karya (TPK) sistem kelompok, (11) pembinaan tenaga kerja mandiri.

PRIORITAS 4 : Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya



Gambar 6.4

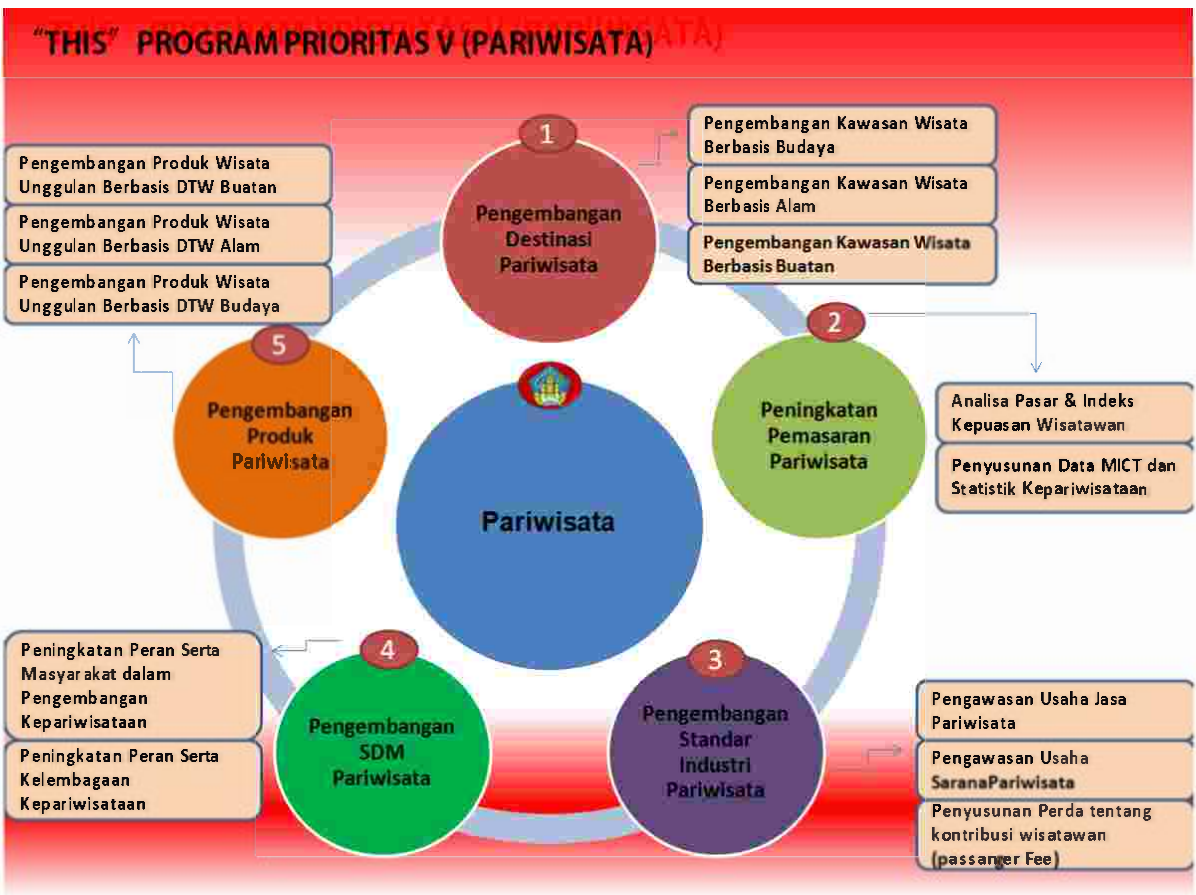
Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 4

Berdasarkan Gambar 6.4 yang menguraikan tentang prioritas 4 : Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya dalam rangka pengembangan pembinaan dalam rangka mengembangkan tata kehidupan karma Bali ditentukan oleh 6 (enam) dimensi yaitu :

1. Penguatan desa adat, merupakan kegiatan prioritas yang dilaksanakan melalui, (1) pembinaan desa adat, (2) pendidikan dan pelatihan desa adat.
2. Penguatan subak, dilakukan melalui kegiatan (1) pembinaan subak dan subak abian, (2) pembinaan penyusunan awig-awig/perarem subak dan subak abian.
3. Pemajuan bahasa, aksara dan sastra, melalui kegiatan (1) alih aksara dan alih bahasa naskah kuno atau lontar, (2) perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sastra.
4. Pemajuan cagar budaya dan permuseuman, melalui kegiatan (1) penyusunan purana pura, (2) pembinaan permuseuman.

5. Pemajuan seni dan tenaga kebudayaan, dilaksanakan melalui kegiatan (1) Pesta Kesenian Bali/PKB, (2) peragaan dan pementasan seni budaya, (3) diplomasi kebudayaan, (4) pembinaan SDM tenaga kebudayaan, (5) festival seni masa kini, (6) penghargaan seni, (7) pameran seni rupa, (8) standarisasi dan sertifikasi lembaga seni (sanggar, yayasan dan sekaa).
6. Pemajuan nilai sejarah dan tradisi, kegiatan prioritas ini dilaksanakan melalui, (1) penyusunan peristiwa sejarah, (2) pencatatan dan pengusulan warisan budaya tak benda, (3) Utsawa Dharma Gita.

PRIORITAS 5 : Pariwisata



Gambar 6.5

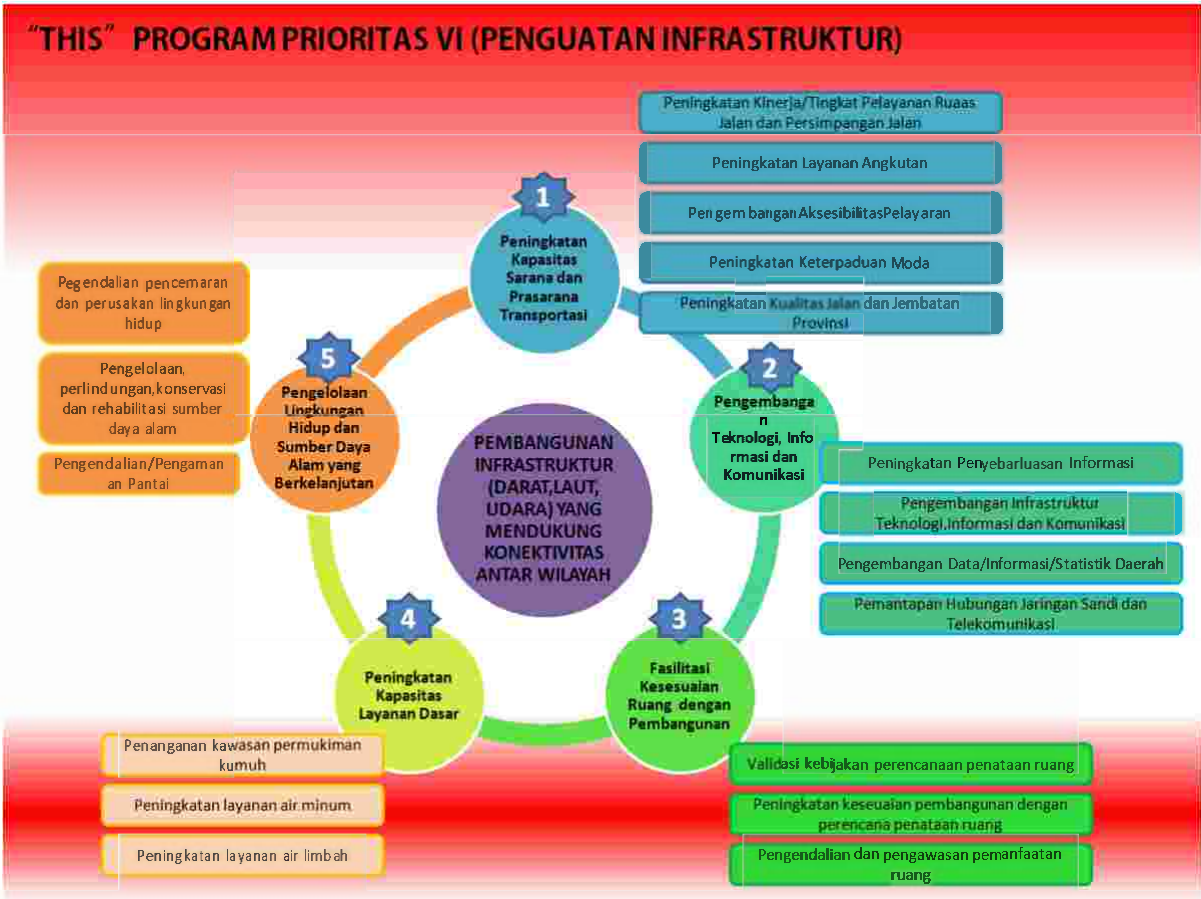
Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 5

Berdasarkan Gambar 6.5 yang menguraikan tentang prioritas 5, Pariwisata dalam rangka pengembangan pariwisata berkelanjutan yang berlandaskan filosofi tri hita karena dalam menjaga keharmonisan alam semesta, manusia dan kebudayaan sebagai

genuine Bali. Pada program prioritas pariwisata terdapat 5 (lima) dimensi yaitu :

1. Pengembangan kawasan wisata berbasis alam, dilaksanakan melalui kegiatan yaitu (1) Pengembangan kawasan wisata berbasis budaya, (2) Pengembangan kawasan wisata berbasis alam, dan (3) Pengembangan kawasan wisata berbasis buatan.
2. Peningkatan pemasaran pariwisata, dilaksanakan melalui kegiatan (1) analisa pasar dan indeks kepuasan masyarakat, (2) penyusunan data MICT dan statistic kepariwisataan.
3. Pengembangan standar industry pariwisata, dilaksanakan melalui kegiatan (1) pengawasan usaha jasa pariwisata, (2) pengawasan usaha sarana pariwisata, (3) penyusunan perda tentang kontribusi pariwisata (passanger fee).
4. Pengembangan SDM pariwisata dilaksanakan melalui kegiatan (1) peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan, (2) peningkatan peran serta kelembagaan kepariwisataan.
5. Pengembangan produk pariwisata. Kegiatan ini dilaksanakan melalui, (1) pengembangan produk wisata unggulan berbasis DTW buatan, (2) pengembangan produk wisata unggulan berbasis DTW alam, (3) pengembangan produk wisata unggulan berbasis DTW budaya.

PRIORITAS 6 : Penguatan Infrastruktur



Gambar 6.6
Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 6

Berdasarkan Gambar 6.6 yang menggambarkan Prioritas Penguatan Infrastruktur (darat, laut dan udara) untuk mendukung semua program prioritas. Kebutuhan akan sarana dan prasarana untuk pembangunan jalan, jembatan, waduk, pabrik, pasar, sentra industry yang akan mendukung konektifitas antar daerah. Terdapat 5 (lima) Program Prioritas yaitu :

1. Peningkatan Kapasitas sarana dan prasarana transportasi, melalui kegiatan (1) peningkatan kinerja/tingkat pelayanan ruas jalan dan pesimpangan jalan, (2) peningkatan layanan angkutan, (3) pengembangan aksesibilitas pelayaran, (4) peningkatan keterpaduan moda, (5) peningkatan kualitas jalan dan jembatan.
2. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, dilaksanakan melalui kegiatan, (1) peningkatan penyebaran informasi, (2) pengembangan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi,

- (3) pengembangan data/informasi/statistic daerah, (4) pemantapan hubungan jaringan sandi dan telekomunikasi.
3. Fasilitasi kesesuaian ruangan dan bangunan, program ini dilaksanakan melalui kegiatan (1) validasi kebijakan perencanaan penataan ruang, (2) peningkatan kesesuaian pembangunan dengan perencanaan penataan ruang, (3) pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.
 4. Peningkatan kapasitas pelayanan dasar, dilaksanakan melalui kegiatan, (1) penanganan kawasan permukiman kumuh, (2) peningkatan layanan air minum, (3) peningkatan layanan air limbah.
 5. Pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan, dilaksanakan melalui kegiatan, (1) pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, (2) pengendalian atau pengamanan pantai.

PRIORITAS 7: Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik



Gambar 6.7

Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 7

Berdasarkan Gambar 6.7 yang menguraikan Prioritas 7, tentang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang tidak bisa dipisahkan dari wilayah birokrasi bersih melayani (WBBK), ditentukan oleh 6 (enam) dimensi/Program Prioritas yaitu :

1. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah, dilaksanakan melalui kegiatan, (1) penerapan atau implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, (2) penyusunan rancangan perda tentang APBD dan rancangan peraturan Kepala Daerah/KDH tentang penjabaran APBD.
2. Peningkatan profesionalisme aparat pemerintah, program prioritas ini dilaksanakan melalui, pelatihan, pendidikan dan melalui pemberian bantuan pendidikan.
3. Efektifitas, efisiensi dan transparansi, kegiatan ini dilaksanakan melalui, (1) pengawasan program prioritas, (2) pengembangan potensi pembiayaan daerah, (3) perumusan kebijakan daerah.
4. Peningkatan kapasitas pendapatan daerah, dilakukan melalui kegiatan, (1) penyebarluasan informasi pajak dan retribusi daerah, (2) penyusunan peraturan dokumen NJKB.
5. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, kegiatan ini dilaksanakan melalui peningkatan pengembangan pemerintahan.
6. Peningkatan kinerja aparatur dan pelayanan publik, program ini dilaksanakan dalam upaya, (1) untuk mengetahui tingkat indeks kepuasan masyarakat/IKM, (2) meningkatkan pelayanan public, dan (3) peningkatan pelaksanaan kerjasama dalam mendorong bertumbuhnya investasi dan pergerakan ekonomi daerah.

Secara menyeluruh, untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan serta pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2021, maka disusun berbagai program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Bali pada tahun 2021. Adapun program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Bali pada tahun 2021 yang dipilih berdasarkan prioritas pembangunan daerah, adalah sebagai berikut :

1. Prioritas Pangan, Sandang dan Papan

1. Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja;
2. Program Prioritas Pembangunan Bali;
3. Program Penunjang Pembangunan Bali;
4. Program Peningkatan Ketersediaan Pangan;
5. Program Pengembangan Perikanan Tangkap;
6. Program Pengembangan Budidaya Ikan;
7. Program Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan;
8. Program Peningkatan Pengawasan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan;
9. Program Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
10. Program Pengembangan Semen;
11. Program Penjaminan Mutu Hasil Pengujian Veteriner;
12. Program Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut;
13. Program Peningkatan Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
14. Program Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan;
15. Program Peningkatan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap di Pelabuhan;
16. Program Sertifikasi Mutu Pangan Segar;
17. Program Pengembangan Budidaya Ikan;
18. Program Peningkatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
19. Program Peningkatan Kapasitas SDM Petani;
20. Program Peningkatan Populasi Ternak Lokal Bali;
21. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak/Hewan;
22. Program Peningkatan Sarana Produksi Pertanian;
23. Program Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
24. Program Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
25. Program Pengembangan Semen;
26. Program Penjaminan Mutu Hasil Pengujian Veteriner;
27. Program Pengembangan Bibit;

28. Program Pemenuhan Sandang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
29. Program Peningkatan Produksi Sandang Lokal Bali;
30. Program Peningkatan aksesibilitas produk sandang lokal Bali;
31. Program Pengembangan Utilitas Perumahan dan Pemukiman;
32. Program Peningkatan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin;
33. Program Pengembangan Perumahan;
34. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan;
35. Program Peningkatan Distribusi Pangan;
36. Program Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
37. Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Ramah Lingkungan;
38. Program Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian;
39. Program Pengembangan Pertanian Organik;
40. Program Pengembangan Pertanian Gumi Banten;
41. Program Pengembangan Pertanian Hidroponic Perkotaan (Urban Farming);
42. Program Pengembangan Pertanian Organik;
43. Program Peningkatan Produktivitas Pertanian;
44. Program Pengembangan Agribisnis Peternakan;
45. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak/Hewan;
46. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
47. Program Penanganan Fakir Miskin;
48. Program Pelayanan Sosial;
49. Program Peningkatan Rehabilitasi Sosial;
50. Program Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial;
51. Program Peningkatan Pemberdayaan Sosial;
52. Program Pelayanan dan Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
53. Program Perlindungan Konsumen;
54. Program Penunjang Pembangunan Bali;
55. Program Pengembangan Produk Lokal Krama Bali;
56. Program Penguatan distribusi produk lokal;

57. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa;
58. Program Pengembangan Pelayanan Penguji Mutu Barang;
59. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Olahan Pangan;
60. Program Pengembangan Industri Kreatif Kerajinan Rakyat;
61. Program Peningkatan ekspor industri kreatif;
62. Program Peningkatan Pengawasan Koperasi;
63. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi;
64. Program Pengembangan dan Penciptaan Iklim Usaha Koperasi;
65. Program Pengembangan Kelembagaan Subak sebagai Koperasi Tani;
66. Program Penciptaan Iklim Usaha dan Pengembangan Kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
67. Program Peningkatan Kompetensi SDM KUKM;
68. Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa (UED);
69. Program Pemberdayaan Kawasan Perdesaan;
70. Program Peningkatan Keswadayaan dan Partisipasi Masyarakat;
71. Program Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
72. Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan
73. Program Pengembangan Koperasi Pengrajin Tenun.

2. Prioritas Kesehatan dan Pendidikan

1. Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja;
2. Program Prioritas Pembangunan Bali;
3. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
4. Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan;
5. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPTD Rumah Sakit Mata Bali Mandara;
6. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali;
7. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPTD RSUD Bali Mandara;
8. Program Pengembangan Sistem Database Kesehatan;
9. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Khusus dan Bahasa;
10. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
11. Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan;

12. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
13. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
14. Program Penguatan Surveilans dan Imunisasi;
15. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
16. Program Pelatihan Tenaga Kesehatan;
17. Program Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Olahraga;
18. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada UPTD RSUD Bali Mandara;
19. Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPTD RSUD Bali Mandara;
20. Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali;
21. Program Produksi Obat Tradisional dan Pengelolaan sediaan Farmasi;
22. Program Jaminan Kesehatan Krama Bali Sejahtera (KBS);
23. Program Pengembangan Teknologi Pendidikan;
24. Program Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan;
25. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan SMA;
26. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Khusus dan Bahasa;
27. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan SMK;
28. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Khusus dan Bahasa;
29. Program Pengembangan Layanan Pendidikan berbasis Nilai-Nilai Hindu;
30. Program Pengembangan Teknologi Pendidikan;
31. Program Peningkatan Kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan;
32. Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda;
33. Program Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-Nilai Jana Kerthi dan
34. Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga.

3. Prioritas Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan

1. Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja;
2. Program Pengembangan Kawasan Pekerja Sektor Informal;
3. Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja;
4. Program Peningkatan Kompetensi Calon Tenaga Kerja;

5. Program Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK)/Techno Park;
6. Program Perencanaan Pengembangan Ketrasmigrasian;
7. Program Peningkatan Kualitas Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja;
8. Program Pengembangan Kawasan Pekerja Sektor Informal;
9. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan
10. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Kerja dan Kesehatan Kerja.

4. Prioritas Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya

1. Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja;
2. Program Prioritas Pembangunan Bali;
3. Program Pemajuan Kesenian;
4. Program Pemajuan Bahasa, Aksara dan Sastra;
5. Program Pemajuan Nilai Sejarah dan Tradisi;
6. Program Pemajuan Cagar Budaya dan Permuseuman;
7. Program Pengembangan UPTD Taman Budaya;
8. Program Pengembangan UPTD Museum Bali;
9. Program Pengembangan UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali;
10. Program Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-Nilai Danu Kerthi;
11. Program Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Wana Kerthi;
12. Program Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Wana Kerthi di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat;
13. Program Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Wana Kerthi di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara;
14. Program Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Wana Kerthi di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan;
15. Program Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Wana Kerthi di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur;

16. Program Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Wana Kerthi di UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai;
17. Program Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-Nilai Atma Kerthi;
18. Program Pemantapan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
19. Program Peningkatan Kesejahteraan Non Pelayanan Dasar;
20. Program Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Danu Kerthi;
21. Program Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Segara Kerthi;
22. Program Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Jagat Kerthi;
23. Program Pemantapan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
24. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Keamanan Tradisional;
25. Program Penguatan Subak;
26. Program Pembinaan Pemerintahan Desa Adat;
27. Program Pembinaan Perekonomian Desa Adat;
28. Program Pemajuan Hukum Adat;
29. Program Pembinaan Pembangunan Desa Adat;
30. Program Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial;
31. Program Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Pembinaan Ormas;
32. Program Peningkatan Kualitas Bangunan dan Lingkungan dan
33. Program Peningkatan Kualitas Penataan Ruang.

5. Prioritas Pariwisata

1. Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja;
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
3. Program Pengembangan Produk Pariwisata;
4. Program Peningkatan Pemasaran Pariwisata;
5. Program Pengembangan Informasi Pariwisata;
6. Program Pengembangan SDM Pariwisata;

7. Program Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana;
8. Program Penanganan darurat bencana, peralatan, dan logistik kebencanaan;
9. Program Pemulihan Pasca Bencana;
10. Program Pengendalian Bencana;
11. Program Sistem Keamanan Terpadu;
12. Program Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat dan
13. Program Pemantapan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

6. Prioritas Penguatan Infrastruktur

1. Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja;
2. Program Penunjang Pembangunan Bali;
3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Jalan;
4. Program Peningkatan Pengawasan LLAJ;
5. Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan Provinsi;
6. Program Pengembangan Infrastruktur Transportasi Publik;
7. Program Pengembangan Manajemen Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Pelayaran;
8. Program Peningkatan Pengendalian Persimpangan Berbasis Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Provinsi;
9. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Trans Sarbagita;
10. Program Peningkatan Ketersediaan Perlengkapan Jalan;
11. Program Peningkatan Operasional Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Bali;
12. Program Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan;
13. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Persampahan;
14. Program Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral;
15. Program Pnaatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
16. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
17. Program Peningkatan Pengelolaan Sampah;
18. Program Perlindungan Sumber Daya Air;
19. Program Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-Nilai Jagat Kerthi;
20. Program Peningkatan Kualitas Penataan Ruang;
21. Program Peningkatan Kualitas Pelaku Jasa Konstruksi;

22. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengujian Laboratorium dan Peralatan;
23. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Minum;
24. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Limbah;
25. Program Peningkatan Kualitas Bangunan dan Lingkungan;
26. Program Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai *Segara Kerthi*;
27. Program Peningkatan Kapasitas Jaringan Irigasi dan
28. Program Pengembangan UPTD. Museum Bali.

7. Prioritas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja;
2. Program Penunjang Pembangunan Bali;
3. Program Pengelolaan Kekayaan Intelektual;
4. Program Peningkatan, Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan;
5. Program Peningkatan Pelayanan Produk Hukum Daerah;
6. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Keuangan Daerah;
7. Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan dan Pelaporan Keuangan Daerah;
8. Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Program Peningkatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
10. Program Peningkatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik;
11. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa;
12. Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur PP;
14. Program Penegakan Produk Hukum Daerah;
15. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
16. Program Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
17. Peningkatan Sistem Keamanan Terpadu;

18. Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Publik;
19. Program Pengembangan Infrastruktur TIK;
20. Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
21. Program Peningkatan Layanan Informasi;
22. Program Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
23. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A;
24. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B;
25. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
26. Program Pengembangan Investasi;
27. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
28. Program Pengembangan Data Statistik Daerah;
29. Program Optimalisasi Keamanan Informasi Publik;
30. Program Peningkatan Layanan Arsip dan Perpustakaan;
31. Program Pengembangan Perpustakaan;
32. Program Peningkatan, Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan;
33. Program Peningkatan Pengembangan Kearsipan;
34. Program Peningkatan Pengolahan Arsip;
35. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
36. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
37. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah;
38. Program Pengadaan dan Informasi Kepegawaian;
39. Program Pengembangan Karier Pegawai ASN;
40. Program Peningkatan Kinerja Pegawai ASN;
41. Program Peningkatan Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan;
42. Program Pengembangan Kompetensi Manajerial;
43. Program Pengembangan Kompetensi Teknis Umum;

44. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
45. Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi;
46. Program Pengembangan Produk Hukum Daerah;
47. Program Bantuan Hukum dan HAM;
48. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kualitas Pelayanan Publik;
49. Program Peningkatan Dan Pengembangan Reformasi Birokrasi;
50. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah;
51. Program Peningkatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
52. Program Peningkatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik;
53. Program Peningkatan Kapabilitas APIP;
54. Program Peningkatan Reformasi Birokrasi;
55. Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
56. Program Pelayanan Komunikasi dan Penyebarluasan Informasi Potensi Daerah;
57. Program Peningkatan Kesetaraan Gender;
58. Program peningkatan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan;
59. Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Anak;
60. Program Penataan Penduduk dan Keluarga Berencana;
61. Program Peningkatan Pencatatan Sipil;
62. Program Peningkatan Pendaftaran Kependudukan;
63. Program Pengendalian dan Pengembangan Kebijakan Perekonomian Daerah;
64. Program Pengendalian Administrasi Pembangunan;
65. Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan;
66. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
67. Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan;
68. Program Peningkatan Kerjasama Daerah;
69. Program Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan dan Otonomi Daerah;

70. Program Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali Berdasarkan Nilai-Nilai *Atma Kerthi*;
71. Program Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
72. Program Percepatan Pemerataan Investasi;
73. Program Peningkatan Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
74. Program Penataan dan Pelayanan Mutasi Pegawai ASN;
75. Program Pengembangan Lembaga Penilaian Kompetensi ASN;
76. Program Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal;
77. Program Peningkatan Kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan C;
78. Program Peningkatan Perencanaan, Pengembangan, dan Regulasi Pendapatan Daerah;
79. Program Peningkatan Kapasitas Pendapatan Daerah;
80. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
81. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Buleleng;
82. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Jembrana;
83. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Tabanan;
84. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Badung;
85. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Denpasar;
86. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Gianyar;
87. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bangli;
88. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Klungkung;
89. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Karangasem;
90. Program Pengembangan Kapasitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

91. Program Pelayanan dan Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
92. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengujian Laboratorium dan Peralatan dan
93. Program Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.

Program-program diatas akan *dibreak down* ke dalam berbagai kegiatan dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk belanja langsung pada Rencana Kerja (Renja) masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Disamping melalui belanja langsung, program dan kegiatan prioritas juga dialokasikan melalui Belanja Tidak Langsung seperti Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah, Belanja Subsidi serta Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota. Pengalokasian anggaran untuk belanja tidak langsung tersebut ditempatkan pada rekening belanja Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021

Program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2021 dilihat berdasarkan urusan sebagaimana ditunjukkan pada ***Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2021.***